

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana pertanian merupakan basis utama perekonomian nasional. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional, seperti peningkatan ketahanan nasional, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), perolehan devisa melalui ekspor-impor, dan penekanan inflasi.

Dalam menghadapi pembangunan, sektor pertanian masih banyak persoalan besar yang harus diselesaikan, diantaranya adalah permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang saat ini terus mengalami peningkatan. Menurut Utomo (dalam Iestari 2009) Alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lahan lainnya. Banyak faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan pertanian sebenarnya bukan masalah baru. Sejalan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk serta meningkatnya kebutuhan infrastruktur seperti, perumahan, jalan, industri, perkantoran, dan bangunan lain menyebabkan kebutuhan akan lahan meningkat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan pertumbuhan yang sangat cepat di beberapa sektor ekonomi. Pertumbuhan tersebut juga membutuhkan lahan yang lebih luas sehingga terjadi peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan, sementara ketersediaan lahan relatif tetap menyebabkan persaingan dalam pemanfaatan lahan. Kebanyakan lahan yang dialihfungsikan umumnya adalah

lahan-lahan pertanian karena *land rent* (sewa lahan). Menurut Barlowe (dalam Putri, 2009) sewa ekonomi lahan (*land rent*) mengandung pengertian nilai ekonomi yang diperoleh oleh satu bidang lahan bila lahan tersebut digunakan untuk kegiatan proses produksi. *Land rent* lahan pertanian relatif lebih tinggi penggunaannya untuk non-pertanian dibandingkan dengan lahan pertanian yang dikelola oleh petani (Putri 2009). Sedangkan fenomena alih fungsi lahan pertanian merupakan dampak dari transformasi struktur ekonomi (pertanian ke industri), dan demografi (pedesaan ke perkotaan) yang pada akhirnya mendorong transformasi sumberdaya lahan dari pertanian ke non-pertanian (Supriyadi 2004).

Pertumbuhan penduduk dan dinamika pembangunan telah menggeser pemanfaatan lahan yang akhirnya menimbulkan kompleksitas permasalahan Lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan. Berubahnya pemanfaatan lahan pertanian ke non pertanian dapat disebut juga sebagai alih fungsi lahan.

Fenomena ini tentunya dapat mendatangkan permasalahan yang serius. Implikasi alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial. Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi karena adanya perubahan rencana tata ruang wilayah, adanya kebijaksanaan arah pembangunan dan karena mekanisme pasar. Dua hal terakhir terjadi lebih sering pada masa lampau karena kurangnya pengertian masyarakat maupun aparat pemerintah mengenai tata ruang wilayah. Alih fungsi dari pertanian ke nonpertanian terjadi secara meluas sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan

yang menekankan kepada aspek pertumbuhan melalui kemudahan fasilitas investasi, baik kepada investor lokal maupun luar negeri dalam penyediaan tanah .

Pertumbuhan penduduk yang cepat diikuti dengan kebutuhan perumahan menjadikan lahan-lahan pertanian berkurang diberbagai daerah, Lahan yang semakin sempit semakin terfregmentasi akibat kebutuhan perumahan dan lahan industri. Petani lebih memilih bekerja di sektor informal daripada bertahan di sektor pertanian. Daya tarik sektor pertanian yang terus menurun juga menjadikan petani cenderung melepas kepemilikan lahannya. Pelepasan kepemilikan lahan cenderung diikuti dengan alih fungsi lahan, Pertumbuhan perekonomian menuntut pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri dan pemukiman. Kondisi demikian mencerminkan adanya peningkatan permintaan terhadap lahan untuk penggunaan nonpertanian yang mengakibatkan banyak lahan sawah, terutama di sekitar perkotaan, mengalami alih fungsi. Alih fungsi lahan juga dapat terjadi oleh karena kurangnya insentif pada usaha tani lahan sawah yang diduga akan menyebabkan terjadi alih fungsi lahan ke tanaman pertanian lainnya (Gunanto, 2007).

Terhadap berkurangnya lahan pertanian secara terus menerus menimbulkan pertanyaan kenapa petani mengalihfungsikan lahannya ke sektor lain atau menjual lahan tersebut, dikarenakan pendapatan petani yang dari waktu ke waktu terus berkurang yang menyebabkan kesejahteraan petani berkurang. Salah satu indikator mengukur kesejahteraan petani adalah Nilai tukar petani, dimana nilai tukar petani tersebut membandingkan pendapatan petani dengan konsumsi petani terhadap konsumsi rumah tangga itu sendiri maupun keperluan sarana produksi usaha tani. Maka pemilik lahan mengalihfungsikan lahan pertaniannya untuk

kepentingan non pertanian oleh karena mengharapkan keuntungan lebih. Secara ekonomis, lahan pertanian, terutama sawah, harga jualnya tinggi karena biasanya berada di lokasi yang berkembang dan tanah yang datar. Namun, bagi petani penggarap dan buruh tani, alih fungsi lahan menjadi bencana karena mereka tidak bisa beralih pekerjaan. Para petani semakin terjebak dengan semakin sempitnya kesempatan kerja sehingga akan menimbulkan masalah sosial yang pelik.

Menurut Aminuddin (2009) faktor penyebab alih fungsi lahan sawah ke non pertanian adalah pesatnya pembangunan fisik seperti jalan raya, pasar, perumahan, perkantoran, terminal, dan lain-lain. Sedangkan menurut Dinaryati (2014) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan yaitu Faktor ekonomi, Faktor sosial, Faktor kondisi lahan dan Faktor peraturan pemerintah, berbeda dengan pendapat Suriyanto (2014) yang menurutnya faktor alih fungsi lahan adalah jumlah penduduk, jumlah industri dan nilai tukar petani. Sedangkan menurut Lestari (2009) faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan adalah faktor eksternal, faktor Internal, dan Faktor Kebijakan. Sedangkan menurut Asnita (2015) faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah adalah jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, perkembangan pemukiman industri, Produktivitas lahan sawah, dan kebijakan pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah ke non pertanian adalah faktor eksternal, Faktor internal, dan Faktor kebijakan pemerintah. Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan kota, demografi maupun ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan sarana prasarana. Sedangkan Faktor internal dilihat dari sisi yang disebabkan oleh kondisi

sosial-ekonomi rumah tangga pertanian penggunaan lahan yaitu nilai tukar petani / kesejahteraan petani, Industri.Faktor Kebijakan yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.Kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan pengawasan yang masih lemah oleh pemerintah yang menjadi alih fungsi lahan tersebut meningkat.

Menurut data BPS dalam Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Februari 2016, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada mencapai 120,65 juta jiwa, dan jumlah petani di Indonesia mencapai 31,73% dari total angkatan kerja di Indonesia, atau sekitar 38,29 juta jiwa. Hampir dari separuhnya merupakan petani gurem dan buruh tani dengan kepemilikan lahan dibawah 0,5 hektar atau mencapai 26 juta keluarga tani. Konversi lahan atau alih fungsi lahan di Indonesia mencapai 110.000 Ha Pertahun, sedangkan pembukaan lahan sawah pertanian di Indonesia sebesar 40.000 Ha pertahun, Karena tidak seimbang nya alih fungsi lahan dan pembukaan lahan baru akan mengurangi lahan yang ada terus menerus. Luas lahan pertanian sawah di Indonesia pada tahun 2013sebesar 8,112 juta hektar, menyusut 0,24% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 8,132 juta hektar. (BPS Indonesia, 2016).

Secara nasional struktur perekonomian bergeser dari perekonomian yang berlandaskan pertanian menjadi perekonomian yang berorientasi kepada industri. Di Sumatera Barat sendiri kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) penyumbang terbesar adalah Kota Padang sebesar 28,18 % pada tahun 2014. (BAPPEDA Sumatera Barat).

Kota Padang merupakan sentra perekonomian dengan jumlah pendapatan perkapita tertinggi di Sumatera Barat, Kota Padang memiliki wilayah seluas 694,96 Km. Kota Padang sebagai kota pelabuhan sejak abad ke 19 telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan sektor perdagangan dan jasa menjadi andalan dibandingkan sektor pertanian dalam mendorong perekonomian masyarakatnya. Hal ini terjadi karena transformasi ekonomi kota cenderung mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri. Salah satu kecamatan di Kota Padang adalah Lubuk Begalung merupakan kawasan alih fungsi lahan yang sangat cepat karena permintaan lahan perumahan, perdagangan dan industri terhadap lahan pertanian.

Luas lahan pertanian di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang tahun 1996 sampai 2015 terjadi penurunan yang signifikan pada tahun tersebut sebesar 297 Ha di tahun 2015. Pada tahun 1996 luas lahan pertanian kecamatan Lubuk begalung sebesar 749 Ha. Terjadi penurunan drastis pada tahun 2001- 2002 sebesar 155 Ha dan rata rata pertahun alih fungsi lahan pertanian di kecamatan Lubuk begalung sekitar 1,9 % atau sebesar 14,85 Ha/tahun. Perubahan tersebut akan terjadi setiap tahunnya dikarenakan permintaan lahan terhadap perumahan, ruko dan industri akan terus terjadi.

Pada tahun tersebut banyak lahan sawah yang sudah dialihkan menjadi perumahan, perdagangan dan industri sebagai contoh memperluas Kampus UPI YPTK dan pembuatan ruko, karena banyaknya lahan sawah yang berkurang terhadap alih fungsi lahan ke non pertanian di kecamatan lubuk begalung tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menerangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Tukar Petani Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Pertanian Tahun 1996-2015” (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang)

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari semua uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana laju alih fungsi lahan di Kecamatan Lubuk Begalung?
2. Berapa besar pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar petani terhadap alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Lubuk Begalung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengkaji laju alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Lubuk Begalung.
2. Mengkaji besar pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar petani terhadap alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Lubuk Begalung.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

A. Bagi Peneliti

- Menambah wawasan peneliti tentang alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- Dapat memberikan informasi yang aktual tentang alih fungsi lahan yang dapat digunakan untuk rekomendasi Kebijakan bagi pemerintah setempat.

B. Bagi Pemerintah

- Sebagai dasar untuk membuat kebijakan terutama terkait dengan pembangunan dan ketahanan pangan.

1.5 SistemetikaPenulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bagian. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I PENGANTAR

Bab ini mencakup uraian mengenai latar belakang masalah, dan rumusan masalah, Selain itu bagian ini juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai teori-teori yang mendukung penelitian, pembahasan mengenai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai cara dan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan perkembangan daerah penelitian baik dari sektor ekonomi, sektor pertanian, perkembangan lahan, keadaan geografi, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomidan nilai tukar petani.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan analisis hasil, interpretasi data, pembahasan dari penelitian serta implikasi kebijakan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan, dan saran berdasarkan hasil penelitian terhadap alih fungsi lahan sawah ke non pertanian di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dalam kaitannya dengan tujuan penelitian.

